KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malili, 3 Maret 2023

Pengguna Anggaran,

Dr. ADNAN

Nip. : 19660502 200003 1 004

Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2022 adalah sebesar **Rp. 7.212.661.932,-** atau mencapai **96,51%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.473.718.450,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 15.574.940.342,01,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 14.787.028,00,-** Aset Tetap sebesar **Rp 15.431.966.647,01,-** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 128.186.667,00,-**.

Kewajiban berupa Utang Jangka Pendek Lainnya senilai **Rp 0,00,-**

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 15.574.940.342,01,-**

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar **Rp 15.574.940.342,01,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. **PENDAPATAN-LO** untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,0 sedangkan jumlah **BEBAN** adalah sebesar **Rp 8.683.029.076,-** yang merupakan **Beban Operasi** terdiri dari **Beban Pegawai** sebesar Rp 1.555.132.023,- **Beban Persediaan** sebesar **Rp 1.503.602.118,-** **Beban Jasa** **Rp 2.902.544.543,-** **Beban Pemeliharaan** sebesar **Rp 237.281.472,-** **Beban Perjalanan Dinas** sebesar **Rp 467.200.248,-** dan **Beban Lain-Lain** **Rp. 8.163.400,-** dan **Beban Penyusutan** sebesar **Rp 2.009.105.272,-** Sehingga terdapat **Defisit-LO** senilai Rp (8.683.029.076,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena ditahun sebelumnya yakni Tahun 2021 belum ada Laporan Ekuitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 15.574.940.342,01,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan

keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- Keberadaan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian, jumlah tenaga kerja yang diserap tentunya berdampak pada sosial kehidupan masyarakat terhadap situasi keamanan lingkungan.
- Kemajemukan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budayanya sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang kaya akan tradisi, ritual adat dan agamanya. Yang harus dijaga atas dasar saling hormat dan menghargai, sehingga tercipta kondisi sosial kehidupan masyarakat yang aman, tentunya berpengaruh pula pada aktifitas sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin baik dan kondusif.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen

- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2022 adalah **Rp. 7.473.718.450,-** terbagi menjadi 57 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 7.212.661.932,-** atau **96,51 %** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1

Pagu Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	17.303.400	16.035.700	92,67
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.495.980	1.960.580	78,55
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.150	2.113.250	84,56
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.715.180	2.457.360	90,51
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.800	1.358.000	54,30
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.981.360	17.405.960	91,70
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.403.152	26.339.745	99,76
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.179.349	1.520.197.523	94,53
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.814.100	28.414.100	98,61
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.550.273	2.550.273	100,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.356.790	9.577.000	92,47
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.538.400	6.884.000	91,32
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.539.280	699.280	45,43

14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	4.340.850	1.670.850	38,49
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.393.292	13.393.292	100,00
16	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8.562.068	8.562.068	100,00
17	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.609.760	24.464.660	99,41
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.088.000	24.613.034	98,11
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5.005.000	4.804.900	96,00
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.280.000	26.850.000	85,84
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.850	4.956.850	99,20
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.250	4.997.250	100,00
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.368.050	5.296.900	98,67
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.300.000	12.290.200	99,92
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
26	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.490.000	99,78
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.957.700	223.906.280	98,66
28	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.766.128	0	0
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	35.100.000	34.150.000	97,29
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	242.750.000	241.564.500	99,51
31	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	48.000.000	47.716.000	99,41
32	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
33	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.568.820	1.568.820	100,00
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	84.638.750	39.705.150	46,91
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0
37	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	15.200.000	15.176.250	98,40
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000	29.792500	97,84
39	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	100,00

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00
41	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	3.864.188.158	3.850.329.293	99,64
42	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	167.925.240	132.981.040	79,19
43	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.024.400	24.868.400	99,38
44	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.504.320	2.294.320	91,61
45	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.499.710	2.438.310	97,54
46	Pengadaan Saran dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	164.950.000	163.384.000	99,05
47	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	69.342.000	68.612.034	98,95
48	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	44.137.130	40.417.130	91,57
49	Penyelenggaraan Kejasama dan Koordinasi antar Daerah Batasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18.204.500	18.038.500	99,09
50	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	10.119.940	10.046.940	99,28
51	Penilaian Saran Prasarana Proteksi Kebakaran	10.039.800	9.909.500	98,70
52	Investigasi Kejadian kebakaran, Meeliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	7.488.380	7.426.380	99,17
53	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	33.255.710	32.836.110	98,74
54	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	24.999.630	24.229.630	96,92
55	Penyelenggaraan operasi Pencarian dan pertolongan pada Peristiwa Yang Menimpah, Membahayakan, dan/atau Mengancam keselamatan Manusia	28.899.800	24.389.800	84,39
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Edukasi	46.900.000	46.900.000	100,00
57	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Edukasi	117.390.000	116.164.000	98,96
JUMLAH		7.473.718.450	7.212.661.932	96,51

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada 2 (Dua) kegiatan yang dikelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur pada Tahun anggaran 2022, realisasi atau serapan anggarannya kurang dari 80%. kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Merupakan belanja rutin berupa penyusunan dokumen RKA. Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.495.980,- realisasi sebesar Rp. 1.960.580,- atau sebesar 78,55 %.

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Merupakan belanja rutin berupa perencanaan kebutuhan barang SKPD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.539.280,- realisasi sebesar Rp. 699.280,- atau sebesar 45,43 %.

c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Merupakan belanja rutin berupa rekonsiliasi penyusunan BMD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.340.850,- realisasi sebesar Rp. 1.670.850,- atau sebesar 38,49 %.

d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Merupakan belanja rutin berupa penyediaan pembayaran tagihan listrik, air dan pulsa HP. Jumlah anggaran sebesar Rp. 84.638.750,- realisasi sebesar Rp. 39.705.150,- atau sebesar 46,91 %.

e. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam daerah Kab/Kota

Merupakan belanja rutin berupa penyediaan operasional pemadaman. Jumlah anggaran sebesar Rp. 167.925.240,- realisasi sebesar Rp. 132.981.040,- atau sebesar 79,19 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- Anggaran Subkegiatan yang bersifat disediakan bila terjadi peristiwa kebakaran atau non kebakaran lainnya.
- Adanya efisiensi dalam pelaksanaan Rapat-rapat Dinas yang membahas kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan Anggaran Kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Kas kurang optimal, serta keluaran (output) dan hasil/manfaat (outcome) kurang mencapai target.

- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan Daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) **Kas di Kas Daerah** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut

mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

- 2) **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
- 3) **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan / atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Dinas PKAD Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;

c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.

Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) ***Ekuitas Dana Dicadangkan*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik / (Turun)	
	Rp	Rp	Rp	%
Aset	15.574.940.342,01	0,00	0,00	0,00%
Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ekuitas	15.574.940.342,01	0,00	0,00	0,00%

5.1.1. Aset

Nilai Aset pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 sebesar Rp 15.574.940.342,01

Adapun aset jenis aset terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar yang berupa Beban Dibayar Dimuka terhadap kendaraan dinas yang nilainya Rp 14.787.028,67, dan Persediaan yang nilainya Rp 395.315.

2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap pada tahun 2022 senilai **Rp 15.431.966.647,01,-** yang meliputi:

- **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 senilai **Rp 14.931.036.819,01,-** yang berasal dari Belanja Modal Alat Besar Rp. **73.370.000,-** Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja senilai **66.500.000,-** Belanja Modal Komputer **120.204.500,-** Belanja Modal Alat Angkutan senilai **Rp 13.487.043.019,-** Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai **Rp. 28.834.000,-**. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai **Rp. 711.428.300,01,-**. Belanja Modal Alat laboratorium senilai **Rp. 217.100.000,-**. Belanja Modal Alat Persenjataan senilai **Rp. 155.984.000,-**.

- **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 senilai **Rp 2.391.665.900,-** yang terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai **Rp. 1.327.380.000,-** Bangunan Gedung Kantor lain-lain senilai **Rp. 414.084.500,-** Gedung Pos Jaga Permanen senilai **Rp. 620.902.400,-** Bangunan Tempat Parkir senilai **Rp. 29.299.000,-** .

- **Jalan, Irigasi, dan Jaringan.**

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp 70.653.200,-** yang terdiri dari Bangunan Menara/Bak Penampung/reservoir Air Minum senilai **Rp 25.000.000,-** Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil senilai **Rp. 39.929.500,-** dan Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang senilai **Rp. 5.723.700,-**.

3. Aset Lainnya

Besaran nilai Aset Lainnya pada tahun 2022 yang terdiri dari : Aset tak berwujud yaitu senilai **Rp 167.200.000,-**

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah **Rp 0,00**

5.1.2.1.2. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 adalah **Rp 0,00**

5.1.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 0,00**.

5.1.3. Ekuitas

5.1.3.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 15.574.940.342,01,-**

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 7.212.661.932,-** atau sebesar **96,51%** dari total anggaran sebesar **Rp 7.473.718.450,-**.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	6.896.852.322	6.680.547.432	96,86
5.2	Belanja Modal	576.866.128	532.114.500	92,24
	JumlahTotal	7.473.718.450	7.212.661.932	96,51

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 1.644.179.349,-** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.555.132.023,-** atau **94,58%** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	633.553.000	591.406.639	
Tunjangan Keluarga	42.375.088	40.666.912	
Tunjangan Jabatan	117.874.986	110.365.000	
Tunjangan Fungsional Umum	5.640.000	5.280.000	
Tunjangan Beras ASN	32.799.650	30.561.240	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.686.526	2.104.029	
Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.099	6.227	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	742.040.000	708.823.976	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	31.200.000	30.318.000	
Belanja Honorarium	27.000.000	26.600.000	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000	9.000.000	
J u m l a h	1.644.179.349	1.555.132.023	

Adanya anggaran yang tidak terealisasi sepenuhnya adalah disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Penurunan anggaran untuk belanja tidak langsung (belanja gaji pokok dan tunjangan) disebabkan karena mutasi dan promosi beberapa pegawai negeri sipil dan pejabat struktural ke instansi lain

➤ Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan lainnya serta Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada Tahun 2022 berkurang

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp. 5.252.672.973,-** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 5.125.415.409,-** atau **97,58 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Barang Pakai Habis	1.525.681.523	1.503.602.118	
Belanja Jasa kantor	2.782.638.750	2.728.294.543	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	177.750.000	174.250.000	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.750.000	168.068.500	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.000.000	84.000.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	511.852.700	467.200.248	
Jumlah	5.252.672.973	5.125.415.409	

C. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 576.866.128,-** sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 532.114.500,-** atau **92,24%** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Modal Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	75.866.128	34.150.000	
Belanja Modal Alat Kantor	34.000.000	34.000.000	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.350.000	32.350.000	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	109.800.000	109.800.000	
Belanja Modal Alat Komunikasi	40.000.000	40.000.000	
Belanja Modal Komputer Unit	50.000.000	48.814.500	

Belanja Modal Peralatan Komputer	16.000.000	16.000.000	
Belanja Modal Alat Pelindung	145.850.000	144.284.000	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.000.000	47.716.000	
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	25.000.000	25.000.000	
Jumlah	576.866.128	532.114.500	

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN - LO

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 0,-**

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	1.555.132.023,00	-	1.555.132.023,00
2	Beban Persediaan	1.503.602.118,66	-	1.503.602.118,66
3	Beban Jasa	2.902.544.543,00	-	2.902.544.543,00
4	Beban Pemeliharaan	237.281.472,00	-	237.281.472,00
5	Beban Perjalanan Dinas	467.200.248,00	-	467.200.248,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.009.105.272,00	-	2.009.105.272,00
7	Beban Lain-lain	8.163.400,00	-	8.163.400,00
	Jumlah	8.683.029.076,00		8.683.029.076,00

Adapun rincian penyesuaian sebagai berikut:

5.3.2.1. Beban Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal	LRA	Saldo Akhir	Beban-LO
1	Belanja Habis Pakai	-	-	-	-
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-	-
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
4	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	-
No	Uraian	Saldo Awal	LRA	Saldo Akhir	Beban-LO
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

5.3.2.2. Beban Jasa

No	Uraian	Belanja – LRA	Beban – LO	Beban Ditangguhkan
1	Belanja Jasa	-	-	-
2	Belanja Premi Asuransi	-	-	-
3	Belanja Sewa	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

5.3.2.3. Beban Penyusutan

No	Uraian	Jumlah Penyusutan
I	PERALATAN DAN MESIN	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	1.299.354.262
2	Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	1.219.643
3	Alat Bengkel Bermesin	665.834
4	Alat Rumah Tangga Mebel	10.276.060
5	Alat Kantor	2.633.332
6	Alat Pendingin	3.575.834
7	Alat Pembersih	40.000
8	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.830.000
9	Alat Pemadam Kebakaran	3.032.004
10	Meja Kerja Pejabat	5.376.668
11	Kursi Kerja Pejabat	5.224.998
12	Alat Komunikasi Telephone	5.241.270
13	Alat Komunikasi Radio SSB	500.000
14	Alat Laboratorium Logam Mesin dan Listrik	3.280.000
15	Alat Laboratorium Pertanian	792.000
16	Alat Laboratorium Kearsipan	1.487.500
17	Personal Komputer	18.842.530
18	Peralatan Personal Komputer	2.375.000
19	Alat Pelindung Lainnya	2.033.335
II	GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	499.671.118
2	Bangunan Gedung Pos Jaga	127.054.979
3	Bangunan Fasilitas Umum	1.790.495
III	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
1	Bangunan Air Bersih	52.083
2	Instalasi Gardu Listrik	9.150.511
3	Jaringan Air Minum	1.605.816
	Jumlah	2.009.105.272

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(8.683.029.076,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	17.045.307.486,01	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.212.661.932,00	0,00
EKUITAS AKHIR	15.574.940.342,01	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. VISI MISI

6.1.1. VISI

Terwujudnya pelayanan prima untuk melindungi dan memberi rasa aman pada seluruh masyarakat dibidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran dengan pola layanan respon cepat, tepat dan benar.

6.1.2. MISI

- ❖ *Memberikan pelayanan yang berkualitas secara merata bagi masyarakat dengan kepastian prosedur, biaya dan waktu yang ditetapkan.*
- ❖ *Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung teknis.*
- ❖ *Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.*
- ❖ *Meningkatkan ketahanan lingkungan kebakaran.*
- ❖ *Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait.*

6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.2.1. TUGAS POKOK

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk Sub Urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
- c. Investigasi kejadian kebakaran
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

6.2.2. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

- Sekretariat yang terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pencegahan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 3. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Dunia Usaha
- Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Pemadam Kebakaran
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
 3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi, dan Pengolah Data
- Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional

6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093.002.0000029719** an. Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur, sesuai dengan SK. Bupati Luwu Timur Nomor : 03 Tahun 2007 tanggal 04 Januari 2007 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 20/F-04/I/TAHUN 2022 tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : **dr. Adnan**

Bendahara Pengeluaran : **Nirwana**

Pengurus Barang : **Ishak**

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:

- ❖ **Burhanuddin, S.H (PPTK)**
- ❖ **Haeruddin Kopa, S.Sos.,M.Si (PPTK)**
- ❖ **Andi Rahmat Reski, S.STP (PPTK)**
- ❖ **Muh. Asri, S.Hut (PPTK)**
- ❖ **Irawati, S.H (PPTK)**
- ❖ **Hiswanto Pakasi, S.E.,M.Si (PPK SKPD)**
- ❖ **Dr. Adnan (PPK Kegiatan)**
- ❖ **Mansyur, S.Sos (Pejabat Pengadaan)**